























putusan ini harusnya dengan jelas meminta tanggung jawab mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harusnya dicantumkan dalam amar putusan dalam putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. karena jika dengan sengaja mantan suami melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan kewajiban memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Dengan tidak memberikan nafkah sudah cukup dikategorikan sebagai penelantaran anak.

Dalam hal ini penulis membahas tentang suami yang melalaikan tanggung jawab keluarga karena lebih mementingkan saudaranya, harusnya suami lebih bisa mengutamakan kewajibannya kepada keluarganya sendiri biarpun saudara dan ponakannya itu termasuk dalam keluarga akan tetapi harusnya suami mengingat bahwa dalam Islam keluarga yang bukan isteri dan anak boleh dibantu bukan sebagai tanggung jawabnya. Dengan alasan suami yang melalaikan kewajiban keluarga menjadi sebab pertengkaran, hal itu juga termasuk dalam penelantara terhadap anak dan isteri.

Pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan suami melalaikan kewajiban keluarga juga termasuk dalam penelantaran isteri dan anak dalam rumah tangga yang berahir dengan isteri dipulangkan kerumah orang tua dalam keadaan isteri hamil muda. Hal itu sangat bertentangan dengan konsep keluarga sakinah, mawadah dan rahmah yang sesuai dengan syariat Islam. Padahal kita sebagai umat Islam yang beragama harusnya lebih mengkonsep keluarga menjadi lebih baik bukannya malah meninggalkan atau melalaikan tanggung jawab atau kewajiban kepada keluarga terutama isteri





rumah tangga pada umumnya menurut kadar kekuatan kehidupan dalam tingkat kehidupan suami isteri tersebut. Tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan tidak boleh terlalu sedikit tetapi sewajarnya saja. Jika seorang suami melalaikan nafkah rumah tangga, diibaratkan berarti ia telah meninggalkan kewajiban beragama. Maka ketika seorang suami tidak memenuhi hal tersebut padahal ia sanggup berarti ia telah berlaku zalim terhadap keluarganya.

Dalam hal ini suami harusnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga apalagi materi karena suami sebagai pihak kepala rumah tangga. Jika suami melalaikan kewajiban kepada keluarga baik secara sengaja atau tidak tetap itu sebuah kesalahan karena termasuk dalam penelantaran anak dan isteri. Pengaturan menelantarka rumah tangga berdasarkan UU PKDRT pasal 9 ayat 1 “ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu” berikut penjelasan dari UU PKDRT pasal 9, ayat (1) :

- (a) frasa penelantaran bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, isteri, anak dan terhadap orang yang ada didalam rumah tangga;
- (b) menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban

tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, isteri, anak dan orang yang ada didalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 1 tahun 1974 *jo* kompilasi hukum islam pasal 77 dan uu No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

(c) atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya;

(d) berdasarkan ulasan tersebut maka sasaran pemidanaan pasal 9 ayat

(1) *jo* 49 : tindakan penelantaran rumah tangga yang dimaksudkan karena menelantarkan dalam lingkup rumah tangga dan tanpa persetujuan atau perjanjian yang mewajibkan memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban kepala keluarga yakni suami. Hal tersebut berdasar pada pasal 34 angka (1) UU perkawinan dan pasal 80 angka

(2) : “ suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(e) Pengaturan pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak mengingat fakta tingginya kasus penelantaran rumah tangga yang











Dalam tulisan ini yang menjadi pihak ketiga adalah saudaranya dan ponakan-ponakan dari sang suami yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya. Sebaiknya jika sudah terjadi perkawinan lebih baik tinggal ditempat yang berbeda dengan keluarga asal, karena bisa jadi bila masih tinggal satu rumah akan memungkinkan baik orang tua, mertua kakak ipar atau keluarga lain akan selalu ikut campur urusan rumah tangga tersebut yang menyebabkan mudah terjadi pertengkaran.

Gangguan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suami yang mementingkan atau mengutamakan kakak dan ponaka-ponakannya yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya, dan suami sudah tidak memperdulikan isteri serta anaknya. Kebutuhan isteri dan anak sudah tidak dicukupi atau diperhatikan dengan baik malah saudaranya yang selalu di utamakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupannya. Gangguang dari pihak keluarga yang dalam hal ini adalah kakak dan ponakan justru menjadi pemicu utama suami isteri sering bertengkar dan berselisish yang berakhir dengan sebuah perceraian.

Padahal seharusnya kakak suami bisa memberikan nasihat yang baik buat kelangsungan rumah tangga saudaranya supaya jangan sampai terjadi perceraian. Gangguan saudara sangat merugikan bagi rumah tangga suami isteri ini karena adanya saudara dan ponakan dalam kelurga tersebut sehingga suami melalaikan tanggung jawab kepada anak dan isteri yang sepatutnya mereka diutamakan oleh suami sebagai kepala keluarga.

















